**EFEKTIVITAS KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM MENINGKATKAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Ahmad Fiqi Syahputra

NPP. 32.0873

Asdaf Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: ahmadfiqisyahputra@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Hj. Nunung Munawaroh S.Ag. M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The Selayar Islands Regency, as an archipelagic region, faces various challenges in implementing digital policies, particularly in the activation of the Digital Population Identity (IKD). The main problems include limited technological infrastructure, hard-to-reach geographical conditions, and low levels of digital literacy among the population. Most previous studies have focused on IKD activation effectiveness in mainland or urban areas with sufficient infrastructure, leaving a research gap in regions with distinct complexities such as islands. Objective:* This study aims to analyze the effectiveness of the performance of the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) in Selayar Islands Regency in increasing IKD activation, as well as to identify the obstacles encountered and the strategies employed in its implementation. **Method:** This research uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants from Disdukcapil and the local community. The data analysis was based on Duncan's organizational effectiveness theory, which includes three indicators: goal achievement, integration, and adaptation. **Research Findings:** The findings indicate that Disdukcapil's effectiveness in IKD activation is still hindered by several key challenges. These include limited internet access in several areas, a lack of public understanding regarding IKD benefits, and insufficient human resources within the department. Nevertheless, efforts have been made, such as direct outreach to the community, inter-agency collaboration, and more adaptive digital service strategies. **Conclusion:** Disdukcapil of Selayar Islands Regency has taken various steps to promote IKD activation through direct services and expanding access points. The current activation rate of 9.41% places Selayar in the fifth position in South Sulawesi Province but remains far below the national target of 30%. Therefore, while the department's performance can be considered moderately effective at the provincial level, it has not yet reached national effectiveness standards.

Keywords: *Effectiveness, Digital Population Identity (IKD), Disdukcapil, Digital Transformation, Selayar Islands Regency.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wilayah kepulauan menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan digital, khususnya dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Permasalahan utama mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah. Di sisi lain, mayoritas penelitian sebelumnya lebih menyoroti efektivitas aktivasi IKD di wilayah daratan atau perkotaan yang memiliki infrastruktur memadai, sehingga belum banyak kajian yang membahas efektivitas implementasi IKD di daerah kepulauan yang memiliki kompleksitas tersendiri. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan aktivasi IKD, serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan melibatkan informan dari pihak Disdukcapil dan masyarakat lokal. Analisis data mengacu pada teori efektivitas organisasi Duncan yang terdiri atas tiga indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. **Hasil Penelitian:** Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas kinerja Disdukcapil dalam aktivasi IKD masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Hambatan utama mencakup terbatasnya akses jaringan internet di sejumlah wilayah, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD, serta keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan Disdukcapil. Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan seperti sosialisasi langsung ke masyarakat, menjalin kerja sama lintas sektor, serta penerapan strategi pelayanan digital yang lebih fleksibel dan adaptif. **Kesimpulan:** Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar telah menunjukkan berbagai upaya dalam mendorong aktivasi IKD melalui layanan langsung dan pembukaan akses layanan di berbagai lokasi. Capaian 9,41% menempatkan Selayar pada posisi kelima di Provinsi Sulawesi Selatan, namun masih jauh dari target nasional sebesar 30%. Dengan demikian, efektivitas kinerja Disdukcapil tergolong cukup berhasil di tingkat provinsi, namun belum dapat dikatakan efektif secara nasional.

Kata Kunci: Efektivitas, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Disdukcapil, Transformasi Digital, Kabupaten Kepulauan Selayar.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Kondisi geografis yang tersebar serta ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak meratanya akses terhadap layanan dasar, termasuk layanan administrasi kependudukan. Hal ini terutama dirasakan di wilayah-wilayah terpencil dan kepulauan, seperti Kabupaten Kepulauan Selayar, yang memiliki kondisi topografi dan aksesibilitas yang sangat terbatas. Dalam konteks ini, kebutuhan akan transformasi digital dalam layanan publik menjadi sangat mendesak sebagai solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan layanan antarwilayah.

Sebagai bentuk respons atas tantangan tersebut, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) meluncurkan inovasi *Identitas Kependudukan*

Digital (IKD). IKD merupakan versi digital dari dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), yang dapat diakses dan digunakan melalui perangkat digital seperti smartphone. IKD tidak hanya berfungsi sebagai pengganti fisik dokumen, tetapi juga dirancang untuk terintegrasi dengan berbagai sistem layanan publik dan sektor swasta, seperti perbankan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Payung hukum pelaksanaan IKD mengacu pada beberapa regulasi nasional, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital, serta Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital. Ketiga regulasi tersebut menjadi dasar hukum sekaligus arahan strategis dalam mempercepat digitalisasi layanan administrasi kependudukan secara nasional.

Namun demikian, di lapangan implementasi IKD masih menghadapi berbagai hambatan. Data akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian aktivasi IKD secara nasional belum mencapai target. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Kepulauan Selayar baru mencapai 9,41% dari total wajib KTP-el, jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Angka ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam mengadopsi layanan digital secara menyeluruh di wilayah kepulauan.

Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, menghadapi hambatan struktural yang signifikan, mulai dari kondisi geografis yang menyulitkan mobilitas, terbatasnya infrastruktur jaringan internet, hingga rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, keterbatasan internal organisasi seperti jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan perangkat teknologi, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan menjadi tantangan tambahan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program IKD di daerah tersebut.

Dalam konteks sistem informasi, studi oleh Sutanta dan Ashari (2012) menekankan pentingnya pemanfaatan *database kependudukan terdistribusi* pada berbagai aplikasi sistem informasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Mereka menegaskan bahwa sistem database terdistribusi dapat memperkuat efisiensi pengelolaan data, memungkinkan akses data secara real-time dan lintas sektor, serta mempercepat proses verifikasi identitas. Konsep ini sangat relevan bagi implementasi IKD, yang menuntut sistem digital yang aman, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan layanan lintas instansi. Dengan penerapan teknologi tersebut, Disdukcapil Kepulauan Selayar memiliki peluang untuk menanggulangi hambatan geografis serta memperluas jangkauan layanan kependudukan digital ke wilayah yang sulit dijangkau secara fisik.

Lebih jauh, efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik, termasuk program IKD, tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi publik untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Dalam hal ini, teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 1985) menyatakan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu menyesuaikan struktur, proses, dan sumber dayanya dengan dinamika lingkungan eksternal. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara faktor internal (struktur, prosedur, SDM, teknologi) dan eksternal (dukungan regulasi, infrastruktur digital, partisipasi masyarakat) dalam menentukan keberhasilan transformasi digital pelayanan publik.

Studi oleh Ahmad Ripa'i (2018) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang juga menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi sangat penting dalam mendukung terwujudnya *Single Identity Number* yang valid dan terintegrasi. Menurutnya, keberhasilan digitalisasi layanan sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, serta pengelolaan data yang akurat dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan kondisi di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menuntut strategi adaptasi teknologi dan peningkatan kapasitas kelembagaan sebagai kunci untuk mendorong pencapaian target aktivasi IKD. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja Disdukcapil dalam mengimplementasikan layanan IKD, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis data dan teori guna mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, inklusif, dan responsif terhadap karakteristik wilayah kepulauan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan aktivasi IKD, dengan menggunakan perspektif teori efektivitas organisasi. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta strategi yang telah dan perlu dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan cakupan aktivasi IKD secara berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif, modern, dan adaptif, khususnya di daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Transformasi digital dalam administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik dan integrasi data nasional. Meskipun program ini didukung penuh oleh kebijakan nasional dan regulasi teknis, pencapaian aktivasi IKD masih menunjukkan disparitas yang tinggi antar daerah, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Kepulauan Selayar, meskipun berada di atas rata-rata provinsi, baru mencapai 9,41% atau 10.064 dari target nasional sebesar 30%, yang mencerminkan rendahnya efektivitas pelaksanaan program IKD di wilayah tersebut.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih terfokus pada kajian aktivasi kebijakan secara umum atau pada daerah perkotaan dengan infrastruktur memadai. Namun, hingga saat ini, belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam konteks daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis, infrastruktur, dan sosial yang kompleks seperti Kabupaten Kepulauan Selayar. Terlebih lagi, masih minim kajian yang menggunakan pendekatan teoritis seperti teori efektivitas organisasi Duncan untuk mengukur sejauh mana capaian tujuan, integrasi antar lembaga, dan kemampuan adaptasi Disdukcapil dalam menghadapi kendala lokal.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian terkait kurangnya pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya aktivasi IKD di daerah kepulauan serta belum optimalnya strategi yang digunakan oleh Disdukcapil dalam menyesuaikan program nasional ke dalam konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi efektivitas kinerja Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar secara menyeluruh serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang dapat diterapkan dalam peningkatan aktivasi IKD.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai studi sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di berbagai wilayah Indonesia. Studi-studi ini memberikan gambaran yang komprehensif terkait efektivitas implementasi, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diadopsi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) masing-masing.

Permadi dan Rokhman (2023) dalam penelitian berjudul “*Aktivasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi*” menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Mereka menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya mendorong penggunaan aplikasi IKD yang aman, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan aktivasi IKD sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadinya di era digital.

Sasongko (2023), dalam penelitiannya berjudul *“Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung”*, juga menggunakan pendekatan kualitatif dan menunjukkan bahwa secara internal, Disdukcapil Kabupaten Bandung telah memiliki kesiapan dalam melaksanakan program IKD. Namun demikian, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi dinilai sebagai langkah penting untuk memperluas jangkauan aktivasi IKD.

Selanjutnya, Maulidya dan Widiyarta (2024) dalam studi *“Optimalisasi Layanan Aktivasi IKD dalam Mendukung Transformasi Digital Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya”* menyoroti bahwa pelayanan aktivasi IKD sudah berjalan dengan baik dari sisi teknis dan infrastruktur. Namun, mereka mencatat bahwa kesadaran masyarakat masih rendah, sehingga pendekatan yang lebih partisipatif dan edukatif dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan IKD oleh warga secara lebih luas dan merata.

A.R., Permata Sari, dan Ayuh (2024) dalam penelitian *“Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu”* menemukan bahwa capaian aktivasi IKD di daerah tersebut masih jauh dari target, hanya sebesar 6,8%. Hambatan utamanya meliputi rendahnya sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur penunjang, seperti jaringan internet dan perangkat digital yang memadai.

Sebagai tambahan, penelitian oleh Diar Dwi Abrianto dan Heri Fathurahman yang berjudul *“Analisis Kebijakan Penerapan Identitas Kependudukan Digital pada Masyarakat Wajib KTP-el di Kota Surakarta”* memberikan perspektif yang lebih fokus pada kebijakan implementasi IKD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan studi kasus instrumental tunggal yang dilakukan di Kantor Disdukcapil Kota Surakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan implementasi IKD di Kota Surakarta dapat dikatakan berhasil, terutama dalam hal cakupan kepesertaan warga wajib KTP-el. Keberhasilan ini didukung oleh strategi teknis dan administratif yang terstruktur dan konsisten, serta pendekatan yang memperhatikan aspek legalitas dan kepastian hukum atas dokumen digital. Evaluasi ini memberikan gambaran bahwa dengan desain kebijakan yang tepat, keberhasilan aktivasi IKD dapat dicapai dan direplikasi di daerah lain.

Secara keseluruhan, studi-studi terdahulu ini menjadi landasan penting bagi penelitian ini dalam melihat praktik terbaik, hambatan umum, dan pendekatan strategis yang dapat diterapkan atau disesuaikan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan aktivasi IKD tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi atau sistem pelayanan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh literasi digital masyarakat, strategi sosialisasi, dan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaharuan utama dalam penelitian ini terletak pada fokus kontekstual yang secara khusus mengkaji efektivitas aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah kepulauan, yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar. Berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti Dinta Fernanda Maulidya & Agus Widiyarta (2024) di Kota Surabaya maupun Permata Sari & Ayuh (2024) di Kabupaten OKU, yang umumnya berada di wilayah daratan dengan akses infrastruktur digital yang relatif baik, studi ini memperlihatkan bagaimana tantangan geografis dan keterbatasan aksesibilitas di

wilayah kepulauan secara signifikan memengaruhi efektivitas program digital. Meskipun sejalan dengan temuan Sasongko (2023) dan Permadi & Rokhman (2023) yang menekankan pentingnya literasi digital masyarakat, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menunjukkan bahwa edukasi digital bukan hanya sebagai sarana pendukung, tetapi juga sebagai strategi adaptif utama yang diterapkan oleh institusi untuk mengatasi hambatan struktural. Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya diukur dari tingkat pencapaian target, tetapi juga dari kemampuan organisasi untuk bertransformasi dan menyesuaikan strategi terhadap realitas sosial dan geografis setempat

.Dari sisi teoritis dan metodologis, penelitian ini juga menawarkan kebaruan yang penting. Dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas organisasi dari Duncan dalam Steers, penelitian ini memberikan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif dibanding studi sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif atau statistik semata. Teori ini memungkinkan analisis terhadap kejelasan tujuan, proses pelaksanaan, serta dampak terhadap pemangku kepentingan, yang semuanya dirangkum dalam satu kerangka evaluatif. Di sisi lain, secara metodologis, penelitian ini menggabungkan pendekatan multi-level dengan menggali data dari berbagai aktor yang terlibat langsung dalam implementasi, mulai dari kepala dinas hingga operator lapangan dan masyarakat pengguna layanan. Hal ini memberikan gambaran utuh tentang dinamika pelaksanaan aktivasi IKD secara nyata, baik dari sisi kebijakan maupun praktik pelayanan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang transformasi digital layanan publik, tetapi juga memberikan sumbangan praktis bagi daerah-daerah dengan kondisi geografis serupa untuk merumuskan strategi kebijakan yang adaptif dan inklusif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam bagaimana efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan dinamika yang terjadi di lapangan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Dengan kata lain, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna, motivasi, dan pengalaman subyektif para pelaksana kebijakan serta masyarakat sebagai penerima layanan.

Metode ini juga dipilih karena fleksibel dan tidak terikat pada prosedur baku seperti dalam pendekatan kuantitatif, sehingga sangat cocok untuk menggali data yang kompleks dan kontekstual, terutama menyangkut proses koordinasi, kendala teknis, adaptasi terhadap perubahan kebijakan, serta persepsi masyarakat terhadap layanan digital kependudukan. Selain itu, karena topik penelitian ini berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dan interaksi antar pemangku kepentingan, maka pendekatan kualitatif mampu memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam dibandingkan sekadar angka statistik.

Sebagai landasan analisis, digunakan teori efektivitas organisasi dari Duncan (1985) yang mencakup tiga indikator: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Teori ini digunakan untuk menilai

sejauh mana Disdukcapil mampu mencapai target aktivasi IKD, melakukan koordinasi internal dan eksternal, serta beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebijakan.

Berikut daftar informan dalam penelitian:

Tabel 2.1
Informan Penelitian

No.	Jabatan/Status	Keterangan
1.	Kepala Disdukcapil	Informan utama (kebijakan)
2.	Kabid Pendaftaran Penduduk	Informan pendukung (pelaksana teknis)
3.	Operator Sistem IKD	Informan teknis
4.	Staf Administrasi	Informan teknis
5.	Masyarakat	Informan eksternal

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2025

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang upaya Disdukcapil dalam mendorong digitalisasi layanan kependudukan serta memberikan masukan untuk peningkatan program IKD di masa mendatang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Efektivitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten kepulauan Selayar dengan menggunakan pendapat dari Duncan daam Sterss yang menyatakan bahwa Efektivitas dapat terjadi pada tiga Indikator, yaitu Pencapaian Tujuan Integrasi dan Adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pencapaian Tujuan

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan representasi nyata dari upaya transformasi digital dalam pelayanan publik yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Program ini ditujukan untuk menciptakan sistem kependudukan yang terintegrasi, akurat, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjawab tantangan zaman dalam hal digitalisasi data dan layanan pemerintahan.

Tabel 3.1
Persentase Aktivasi IKD Sulawesi Selatan Hingga Mei 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH AKTIVASI IKD	JUMLAH WAJIB KTP-EL	PERSENTASE (%)
1	Kota Parepare	30.124	161.599	18,64%
2	Kab. Bulukumba	74.251	475.405	15,62%
3	Kab. Soppeng	30.317	241.364	12,56%
4	Kab. Bantaeng	21.751	214.098	10,16%
5	Kab. Kepulauan Selayar	10.064	106.921	9,41%
6	Kab. Pangkajene Kepulauan	31.223	360.004	8,67%
7	Kab. Sinjai	22.629	274.439	8,25%
8	Kab. Luwu Utara	26.577	334.276	7,95%
9	Kota Makassar	117.184	1.477.861	7,93%
10	Kab. Barru	13.291	195.385	6,80%

11	Kab. Wajo	27.862	410.729	6,78%
12	Kab. Luwu Timur	21.362	316.000	6,76%
13	Kab. Bone	52.639	822.763	6,40%
14	Kota Palopo	9.723	180.518	5,39%
15	Kab. Toraja Utara	13.634	264.277	5,16%
16	Kab. Gowa	38.878	806.908	4,82%
17	Kab. Jeneponto	17.900	422.267	4,24%
18	Kab. Pinrang	14.688	420.493	3,49%
19	Kab. Tana Toraja	8.073	258.257	3,13%
20	Kab. Takalar	9.526	329.997	2,89%
21	Kab. Luwu	10.169	383.198	2,65%
22	Kab. Maros	9.452	404.979	2,33%
23	Kab. Enrekang	3.928	232.865	1,69%
24	Kab. Sidenreng Rappang	5.331	330.198	1,61%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

Data capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Sulawesi Selatan per Mei 2025 menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada posisi kelima dengan capaian sebesar 9,41%, atau sekitar 10.064 aktivasi dari total 106.921 wajib KTP-el. Meskipun angka ini masih berada jauh di bawah target nasional sebesar 30% yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, capaian tersebut dapat dikategorikan cukup progresif apabila dilihat dari konteks geografis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi, infrastruktur digital, dan sebaran penduduk yang tersebar di beberapa pulau.

Posisi ini bahkan menempatkan Selayar di atas beberapa kabupaten/kota lainnya yang memiliki tantangan serupa, mengindikasikan bahwa strategi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat telah menghasilkan kemajuan yang positif dalam konteks lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas kinerja instansi pelayanan publik seperti Disdukcapil tidak hanya diukur dari capaian kuantitatif semata, tetapi juga dari bagaimana strategi dan pendekatan yang diterapkan mampu menyesuaikan diri dengan realitas dan hambatan daerah masing-masing.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hutasoit (2023), wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) seperti Batam juga menghadapi urgensi tinggi terhadap validitas data kependudukan yang mutakhir, khususnya dalam mendukung mobilitas lintas wilayah dan sistem pelayanan publik berbasis digital. Dalam konteks ini, penggunaan sistem digital seperti IKD menjadi instrumen penting dalam memastikan integritas dan keakuratan data. Oleh karena itu, efektivitas kinerja Dukcapil diukur dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjangkau masyarakat secara luas, termasuk di wilayah-wilayah yang sulit diakses, serta menyediakan pelayanan yang cepat, akurat, dan adaptif terhadap dinamika kependudukan.

Strategi yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan pendekatan yang bersifat komprehensif dan adaptif terhadap kondisi demografis dan geografis setempat. Fokus utama diarahkan pada kelompok usia produktif dan pengguna aktif layanan digital, yang dinilai sebagai segmentasi masyarakat dengan potensi akselerasi tertinggi terhadap adopsi layanan IKD. Penentuan target aktivasi sebesar 30% disusun berdasarkan kajian terhadap kesiapan infrastruktur teknologi, karakteristik sosial budaya masyarakat lokal, serta kendala geografis yang memerlukan pendekatan distribusi layanan yang lebih fleksibel dan mobile.

Implementasi program di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan IKD sangat bergantung pada peran strategis dan operasional dari operator komputer serta staf pendaftaran penduduk. Mereka tidak hanya bertugas memastikan kelancaran teknis sistem, tetapi juga secara aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya aktivasi IKD serta tata cara penggunaannya. Peran mereka mencakup verifikasi data penduduk, bimbingan teknis penggunaan aplikasi IKD, serta pemeliharaan perangkat dan jaringan agar sistem tetap berfungsi optimal. Fungsi edukatif ini sangat penting untuk mengatasi hambatan literasi digital dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang baru ini.

Respons masyarakat terhadap program IKD menunjukkan variasi yang cukup luas. Sebagian warga melaporkan kemudahan yang signifikan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, yang sebelumnya dianggap rumit dan memakan waktu. Namun, terdapat pula segmen masyarakat yang masih mengalami kesulitan dan kebingungan pada tahap awal aktivasi, terutama yang kurang familiar dengan teknologi digital atau memiliki keterbatasan akses internet. Meskipun demikian, secara umum antusiasme dan kesadaran masyarakat mulai meningkat, terutama seiring dengan intensifikasi edukasi langsung dari petugas lapangan dan kampanye sosialisasi yang dirancang secara sistematis dan bersifat partisipatif.

Pencapaian yang telah diraih di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi bukti bahwa meskipun tantangan geografis dan teknis masih signifikan, sinergi antara strategi program, peran SDM pelaksana, serta respons masyarakat dapat menciptakan kemajuan berarti dalam digitalisasi administrasi kependudukan. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam merancang kebijakan pelayanan publik berbasis teknologi digital, yang tidak hanya mengandalkan perangkat dan aplikasi canggih, tetapi juga perhatian serius pada aspek sosio-kultural dan kapasitas manusia sebagai pengguna utama layanan.

3.2. Integrasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki peran strategis dalam mengaktualisasikan program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas integrasi sistem layanan, keterlibatan lintas sektor pemangku kepentingan, serta kapasitas institusi dalam menyediakan layanan yang inklusif, adaptif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu indikator penting dari keberhasilan tersebut adalah kemampuan Disdukcapil dalam menjalin koordinasi lintas sektor yang berkesinambungan, guna meningkatkan akseptabilitas dan legalitas IKD sebagai dokumen resmi dalam berbagai transaksi administrasi publik.

Koordinasi eksternal dilakukan dengan berbagai instansi dan sektor, seperti pemerintah daerah, lembaga perbankan, kepolisian, institusi pendidikan, serta fasilitas layanan kesehatan. Kolaborasi ini ditujukan untuk memperluas penggunaan IKD sebagai identitas digital sah yang dapat dipakai dalam berbagai kebutuhan administratif warga. Dengan demikian, IKD tidak hanya menjadi alat identifikasi individual, tetapi juga menjadi kunci utama dalam mendukung percepatan transformasi pelayanan publik berbasis digital. Integrasi sistem ini turut mendorong efisiensi birokrasi, mempercepat proses verifikasi data, dan menciptakan pengalaman layanan yang lebih praktis dan terpercaya.

Di sisi internal, koordinasi antarbidang dalam struktur Disdukcapil juga memegang peran vital. Setiap bidang, mulai dari Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, hingga Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, bekerja secara sinergis untuk memastikan konsistensi data, keakuratan, serta keterbaruan sistem secara real time. Disdukcapil secara berkala melakukan pembaruan perangkat

lunak, perbaikan prosedur pelayanan, dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, simulasi sistem, dan evaluasi berkala.

Beberapa aspek penting dalam pembaruan sistem tersebut meliputi:

- Penyempurnaan antarmuka pengguna (*user interface*) aplikasi IKD agar lebih ramah pengguna dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dari berbagai latar belakang digital;
- Optimalisasi basis data kependudukan guna mempercepat proses pencarian dan validasi informasi secara otomatis dan terintegrasi;
- Penguatan sistem keamanan data untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi pribadi warga negara.

Untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, Dukcapil juga membentuk pusat layanan IKD di berbagai lokasi strategis seperti kantor kecamatan dan kelurahan. Tidak hanya itu, tim lapangan dengan perlengkapan *mobile device* dan sistem satelit juga diterjunkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses jaringan internet. Proses pendaftaran awal dilakukan secara *offline* dan disinkronkan dengan database pusat saat konektivitas memungkinkan. Inovasi ini merupakan solusi tepat dalam menjawab tantangan geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau-pulau dengan tingkat infrastruktur yang belum merata.

Sosialisasi juga menjadi pilar penting dalam strategi implementasi IKD. Dukcapil aktif menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk menyebarkan informasi seputar IKD dengan konten yang edukatif, visual, dan mudah dipahami. Untuk menjangkau kelompok masyarakat non-digital seperti warga lanjut usia, kelompok rentan, dan masyarakat pedesaan, pendekatan komunikasi konvensional tetap dioptimalkan, seperti melalui penyuluhan desa, kerja sama dengan perangkat desa, hingga melibatkan tokoh masyarakat lokal.

Penelitian Amalia & Hartono (2024) di Kota Pekanbaru menelaah inovasi layanan publik melalui pendekatan difusi inovasi. Mereka menemukan bahwa tingkat aktivasi IKD berkorelasi positif dengan kecepatan dan strategi penyebaran informasi oleh Dukcapil. Faktor-faktor seperti pendekatan proaktif ke masyarakat, kolaborasi dengan instansi lain, dan pelatihan petugas Dukcapil menjadi pendorong utama efektivitas implementasi. Ini menekankan pentingnya manajemen perubahan dalam struktur organisasi Dukcapil agar mampu mengadopsi inovasi digital secara optima.

Dalam konteks komunikasi publik digital, Madjid et al. (2024) menekankan bahwa keberhasilan layanan berbasis digital sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah, baik secara interpersonal maupun digital. Komunikasi yang responsif, transparan, dan edukatif mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat. Penelitian mereka juga menyoroti pentingnya membangun *engagement* melalui kanal digital yang interaktif serta strategi komunikasi dua arah yang inklusif terhadap berbagai segmen masyarakat.

Secara keseluruhan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar telah menunjukkan komitmen kuat dan terarah dalam mengembangkan layanan IKD yang terintegrasi, inklusif, dan adaptif terhadap kondisi wilayah kepulauan. Ke depan, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital, serta kesenjangan partisipasi masyarakat masih perlu menjadi perhatian utama. Diperlukan pendekatan inovatif dan kolaboratif—baik dari aspek teknologi, komunikasi, maupun kemitraan lintas sektor—agar manfaat dari digitalisasi layanan kependudukan dapat dirasakan secara adil, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh warga.

3.3. Adaptasi

Adaptasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, termasuk kemampuan dalam mengubah dan menyelaraskan standar prosedur

operasional secara dinamis ketika terjadi perubahan. Penelitian ini menganalisis efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan fokus pada indikator adaptasi.

Peningkatan kemampuan merupakan faktor penting dalam adaptasi organisasi. Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar telah menunjukkan upaya sistematis dalam meningkatkan kemampuan organisasi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi. Upaya adaptasi terhadap perubahan teknologi dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan sistem keamanan, pembaruan prosedur operasional, serta penerapan teknologi mutakhir seperti cloud computing dan kecerdasan buatan. Pembaruan SOP dan pengembangan layanan berbasis aplikasi mobile mencerminkan respons organisasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Sistem layanan juga terus disesuaikan untuk mendukung efisiensi dan aksesibilitas.

Mahknunah & Choiriyah (2021) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana layanan Dukcapil di Kabupaten Sidoarjo. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat sangat memengaruhi kepercayaan publik terhadap program layanan, termasuk IKD. Ketersediaan fasilitas yang memadai, pelayanan yang cepat dan ramah, serta sistem antrian yang tertib meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program baru, termasuk digitalisasi identitas. Efektivitas kerja Dukcapil dalam konteks ini terlihat dari bagaimana mereka menciptakan lingkungan layanan yang kondusif untuk transformasi digital.

Tabel 3.2
Standar Operasional Prosedur (SOP) Aktivasi IKD

No	Tahapan Pelayanan	Deskripsi
1	Pendaftaran	Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Identitas Kependudukan Digital melalui aplikasi resmi Dukcapil atau datang langsung ke kantor Dukcapil setempat.
2	Verifikasi Data	Petugas Dukcapil melakukan verifikasi data kependudukan pemohon untuk memastikan kebenaran dan keakuratan informasi yang diberikan.
3	Aktivasi IKD	Setelah data terverifikasi, pemohon akan menerima instruksi untuk mengaktifkan IKD pada perangkat smartphone mereka.
4	Penggunaan IKD	IKD yang telah aktif dapat digunakan sebagai Single Sign-On (SSO) untuk mengakses berbagai layanan digital pemerintah.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar

Dari sisi internal organisasi, Disdukcapil telah melakukan penyesuaian struktur dan prosedur operasional dengan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yang relevan dengan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Prosedur ini mencakup tahapan yang sistematis mulai dari pendaftaran, verifikasi data, aktivasi, hingga pemanfaatan IKD untuk mengakses berbagai layanan digital lainnya. Inisiatif ini menunjukkan bentuk adaptasi struktural yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan modernisasi pelayanan publik. SOP yang tertuang dalam Tabel 3.2 mencerminkan upaya organisasi dalam merespons tuntutan transformasi digital yang berbasis teknologi informasi.

Dalam konteks penguatan kapasitas sumber daya manusia, Disdukcapil telah melaksanakan pelatihan teknis dan simulasi sistem kepada operator dan petugas pelayanan sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap sistem digital baru. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para staf memiliki kompetensi teknis dan pemahaman praktis dalam mengoperasikan sistem IKD secara efektif. Namun demikian, efektivitas pelatihan ini perlu ditingkatkan agar staf tidak hanya mampu menangani kendala

teknis, tetapi juga dapat memberikan edukasi serta pendampingan yang memadai kepada masyarakat, khususnya yang masih memiliki keterbatasan literasi digital.

Studi oleh Suasridewi et al. (2024) di Kota Surakarta menunjukkan bahwa implementasi IKD merupakan bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital. Penelitian ini menyoroti bahwa efektivitas pelaksanaan IKD sangat bergantung pada kesiapan kebijakan lokal, kualitas sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi informasi.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hutasoit dan Gaol (2023) yang mengkaji implementasi kebijakan pelayanan KTP-el di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan KTP-el belum berjalan maksimal akibat berbagai kendala internal, antara lain kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, keterbatasan alat perekaman dan jaringan, serta kompetensi pegawai yang belum memadai. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas digital juga menjadi faktor penghambat utama. Rekomendasi dari penelitian tersebut meliputi perlunya pelatihan berkala bagi pegawai, perbaikan alat dan infrastruktur digital, serta peningkatan intensitas dan kualitas edukasi publik. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kesiapan organisasi dalam melaksanakan layanan digital tidak hanya bergantung pada kebijakan struktural, tetapi juga memerlukan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.

Disdukcapil juga telah menunjukkan upaya adaptasi teknologi melalui integrasi *cloud computing*, sistem keamanan data, dan pengembangan aplikasi layanan digital berbasis *mobile*. Langkah ini mencerminkan komitmen organisasi terhadap prinsip kecepatan, aksesibilitas, dan perlindungan data pribadi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Teknologi ini juga memungkinkan layanan jarak jauh, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Selayar yang sulit dijangkau secara fisik.

Namun demikian, di balik berbagai inovasi tersebut, masih terdapat tantangan eksternal yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital seperti jaringan internet yang belum merata serta rendahnya tingkat literasi digital, khususnya di kalangan lansia dan masyarakat pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program IKD tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan internal organisasi, tetapi juga oleh kemampuannya dalam membangun sinergi dengan pihak eksternal seperti Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan infrastruktur, serta pemerintah desa dalam proses edukasi dan pendampingan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun adaptasi yang dilakukan Disdukcapil sudah menunjukkan arah strategis yang positif, efektivitasnya masih terbatas dan belum sepenuhnya inklusif. Diperlukan langkah lanjutan berupa pengembangan model layanan alternatif seperti sistem aktivasi semi-online dan *mobile service*, serta perluasan program literasi digital bagi masyarakat. Adaptasi juga harus terus bersifat dinamis, mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi nasional, agar pelayanan administrasi kependudukan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat di era digital secara adil dan merata.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berbagai studi sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di berbagai wilayah Indonesia. Studi-studi ini memberikan gambaran komprehensif terkait efektivitas implementasi, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diadopsi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di daerah masing-masing.

Permadi dan Rokhman (2023) dalam penelitian berjudul “*Aktivasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi*” menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya mendorong penggunaan aplikasi IKD secara aman. Penelitian ini

menekankan bahwa keberhasilan aktivasi IKD sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadinya di era digital. Temuan ini sejalan dengan kondisi di Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana edukasi digital menjadi bagian krusial dalam strategi Disdukcapil untuk mengatasi miskonsepsi dan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya dalam penggunaan data kependudukan berbasis digital. Sasongko (2023) yang meneliti aktivasi IKD di Kabupaten Bandung juga menemukan bahwa kesiapan internal Disdukcapil sudah cukup baik, namun rendahnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan utama. Hal ini mirip dengan realitas di Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana literasi digital yang masih rendah terutama di wilayah terpencil mengharuskan Disdukcapil menyediakan layanan tatap muka sebagai pendamping agar masyarakat dapat memahami dan mengakses layanan IKD secara optimal.

Maulidya dan Widiyarta (2024) meneliti Kota Surabaya dan melaporkan bahwa pelayanan teknis dan infrastruktur aktivasi IKD berjalan relatif optimal, meskipun kesadaran masyarakat masih rendah. Berbeda dengan Surabaya, di Kabupaten Kepulauan Selayar hambatan utama bukan hanya kesadaran masyarakat, tetapi juga keterbatasan infrastruktur, seperti jumlah komputer layanan yang minim dan kendaraan operasional yang kurang memadai. Kondisi ini menegaskan pentingnya faktor infrastruktur dalam konteks daerah kepulauan yang sulit dijangkau. A.R., Permata Sari, dan Ayuh (2024) meneliti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan menemukan capaian aktivasi IKD yang rendah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, dukungan masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur. Temuan ini sangat relevan dengan Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana hambatan serupa ditemukan, khususnya dalam menjangkau wilayah kepulauan yang geografisnya menantang. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosialisasi dan dukungan infrastruktur merupakan aspek kritical yang memengaruhi efektivitas program aktivasi IKD di berbagai daerah dengan karakteristik geografis yang sulit.

Selain itu, Diar Dwi Abrianto dan Heri Fathurahman dalam studi mereka di Kota Surakarta memberikan perspektif kebijakan yang menunjukkan bahwa desain kebijakan yang terstruktur dan konsisten dapat mendukung keberhasilan aktivasi IKD. Keberhasilan Surakarta dalam cakupan kepesertaan warga wajib KTP-el didukung oleh pendekatan yang memperhatikan aspek legalitas dan kepastian hukum dokumen digital. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa selain aspek teknis dan sosialisasi, kebijakan yang matang dan berkelanjutan juga menjadi penentu keberhasilan aktivasi IKD.

Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu menegaskan bahwa keberhasilan aktivasi IKD sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan internal Disdukcapil, literasi digital masyarakat, dukungan infrastruktur, strategi sosialisasi yang efektif, serta kebijakan yang mendukung. Kondisi di Kabupaten Kepulauan Selayar mencerminkan tantangan khas daerah kepulauan yang memerlukan pendekatan adaptif dan holistik agar program IKD dapat berjalan optimal. Dengan demikian, adaptasi strategi berdasarkan konteks lokal, penguatan kapasitas infrastruktur digital, dan pengembangan edukasi yang inklusif menjadi langkah strategis yang harus terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas aktivasi IKD di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama yang telah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini juga mengungkap sejumlah temuan menarik yang mencerminkan konteks lokal Kabupaten Kepulauan Selayar. Penerapan layanan offline untuk aktivasi IKD muncul sebagai strategi adaptif yang relevan di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur internet, dan berpotensi menjadi contoh praktik baik bagi daerah kepulauan lainnya. Ketersediaan perangkat keras seperti komputer dan scanner menunjukkan kesadaran akan pentingnya kesiapan teknologi, namun tidak adanya server khusus dalam inventaris menandakan perlunya penguatan infrastruktur digital internal. Kebutuhan akan pendampingan literasi

digital, terutama bagi kelompok rentan dan lanjut usia, juga menjadi sorotan penting, mengingat transformasi digital akan efektif hanya jika inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, terbatasnya jumlah mobil dinas untuk pelayanan keliling menegaskan pentingnya penguatan logistik guna menjangkau wilayah terpencil secara merata. Temuan-temuan ini menekankan bahwa keberhasilan aktivasi IKD sangat dipengaruhi oleh strategi adaptif yang mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan teknologis daerah.

IV. KESIMPULAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar telah menjalankan tugasnya dalam mendorong aktivasi IKD melalui berbagai upaya, seperti pelayanan langsung dan penyediaan akses di berbagai titik layanan. Hal ini terbukti dari capaian aktivasi sebesar 9,41% atau 10.064 dari 106.921 wajib KTP-el, yang menempatkan Selayar pada peringkat kelima di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, capaian ini masih berada jauh di bawah target nasional sebesar 30%, yang menandakan bahwa efektivitas kinerja Disdukcapil dapat dikatakan cukup berhasil di tingkat provinsi, namun belum efektif secara nasional

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup wilayah yang hanya difokuskan pada Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain. Selain itu, pendekatan kualitatif tanpa data kuantitatif membatasi pengukuran efektivitas secara statistik. Keterbatasan akses terhadap informasi teknis internal dan waktu pelaksanaan yang terbatas juga mengurangi kedalaman analisis terhadap kesiapan sistem dan dinamika jangka panjang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan secara komparatif antar daerah guna mendapatkan gambaran nasional IKD. Penggunaan metode kuantitatif atau mixed methods akan memperkaya analisis efektivitas secara objektif. Selain itu, studi jangka panjang dan evaluatif diperlukan untuk menilai dampak kebijakan secara berkelanjutan. Fokus pada keamanan data dan inovasi pelayanan digital juga menjadi arah penting untuk menjawab tantangan transformasi administrasi kependudukan ke depan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini, khususnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar serta seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, D. D., & Fathurahman, H. (2024). Analisis Kebijakan Penerapan Identitas Kependudukan Digital pada Masyarakat Wajib KTP-el di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(2), 120–132.
- Amalia, H., & Hartono, T. (2024). Public service innovation: Diffusion study of innovation using digital population identity (IKD) application in Pekanbaru City. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 117–130. <https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.117-130>
- Creswell. (2016). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. PT Pustaka Pelajar.
- Dra. Gatningsih, M. T., & Drs. Eko Sutrisno, M. S. (2017). *KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN*.
- Fakrulloh, Z. A. (2018). *Teknologi Informasi Dalam Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Cempaka Putih.
- Fulthoni, Arianingtyas, R., Aminah, S., & Sihombing, U. (2009). *Buku Saku Untuk Kebebasan*

- Beragama “Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan.”* www.mitrahukum.org
- Hutasoit, I., & Gaol, J. D. C. L. (2023). Implementation of Service Policy Electronic Identity Card in Hasundutan Humbang District North Sumatera Province. *Jurnal ARISTO (Sosial, Politik & Humaniora)*, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *11*(02).
- Hutasoit, I. (2023). Population growth in Batam Municipality as the frontier and outermost region at the border between Indonesia–Singapore–Malaysia. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, *12*(2), 165–176. <https://doi.org/10.20473/jbk.v12i2.2023.165-176>
- Madjid, U., Kawuryan, M., Averus, A., & Triyanto, T. (2024). Communication in Digital-Based Public Services in Regional Government of West Java Province. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, *16*(1), 48-61. <https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3778>
- Mahknunah, L., & Choiriyah, I. U. (2021). Survei kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *International Journal on Human Computing Studies*, *3*(2), 287–294. <https://media.neliti.com/media/publications/343918-survei-kepuasan-masyarakat-terhadap-kete-779893fb.pdf>
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, *4*(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Permata Sari, P. W., & Ayuh, E. T. (2024). Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. *J-Sikom*, *5*(1), 73–86. <https://doi.org/10.36085/jsikom.v5i1.6400>
- Ripa'i, Ahmad (2018). PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MENUJU SINGLE IDENTITY NUMBER DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal. Dukcapil : Vol.6, No.1 - Juni 2018*
- Sasongko, R. W. (2023). Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, *5*(1), 69–86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. ALFABETA, CV.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In Alfabeta (Vol. 2018, Issue 1).
- Sutanta, E., & Ashari, A. (2012). Pemanfaatan Database Kependudukan Terdistribusi Pada Ragam Aplikasi Sistem Informasi Di Pemerintah Kabupaten/Kota. *Jurnal Sistem Informasi & Teknologi Informasi (SISFOTENIKA)*, STMIK Pontianak, Kalimantan Barat, ISSN: 2087-7897, *2*(1), 11–20. <http://www.sisfotenika.stmikpontianak.ac.id/>
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Suasridewi, D. G., Agustina, F., Kamariyah, S., & Widyawati, W. (2024). Transformation of Public Services: Policy Analysis of Digital Population Identity Implementation in Surakarta City. *International Journal of Social Science and Humanity*, *1*(1), 1–10. <https://international.appisi.or.id/index.php/IJSS/article/view/233>
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. PT Gramedia Widiasarana (Vol. 1, Issue 1)
- Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Humaniora*, *7*(2), 415–426. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>